



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KAMIS, 31 MEI 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

# Raih WDP, Bupati Kecewa

**KEPAHIANG, BE** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan APBD 2017. Opini WDP tersebut diserahkan BPK RI Perwakilan Bengkulu kepada ketua DPRD H Badarudin Amd dan Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayatullah Sjahid MM Senin (28/5) di Bengkulu.

Bupati Dr Ir Hidayatullah Sjahid MM mengaku kecewa dengan kinerja jajarannya, hingga dua tahun berturut

pihaknya mendapatkan opini WPD dari BPK RI Perwakilan Bengkulu. "Secara prinsip selaku Bupati dan Pemkab Kepahiang kami kecewa. Komitmen Sekda, Inspektur dan para Kepala OPD masih belum optimal. Kurang cermat melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan," terang Bupati.

Menurut Bupati, kesalahan-kesalahan tahun lalu masih terjadi, sehingga terjadi temuan kerugian negara dalam pengelolaan keuangan atau APBD 2017. "Kesalahan

seperti ketekoran kas, pelaksanaan verifikasi keuangan oleh verifikator tidak berjalan, peng SPJ yang tidak akurat sesuai mata anggaran dan hal-hal lain yang bersifat material. Sehingga secara akumulatif tidak memberikan dukungan terhadap upaya ke arah WTP," ungkapnya.

Ditegaskan Bupati Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyebab gagalnya WTP terjadi lingkungan Setda, Setwan dan beberapa OPD. "Perlu komitmen yang tinggi dan upaya yang sungguh untuk mendapat

Opini WTP. Ini pelajaran yang pahit," kata Bupati.

Sebelumnya Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang sudah mengingatkan agar 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelesaikan pemberkasan SPJ penggunaan anggaran yang diminta audit BPK. Supaya Pemkab Kepahiang dapat kembali meraih Opini WTP seperti awal kepemimpinan Hidayatullah Sjahid dan Netti Herawati SSOs. Setidaknya ada 8 OPD jadi temuan BPK

Kepala Inspektorat Daerah Harun, SE. Ak, M.Si men-

gatakan indikasi kerugian keuangan negara terjadi karena SPJ Bendahara belum lengkap hingga disinyalir adanya penyelewengan dana dalam penyerapan anggaran. Sehingga dana terserap tak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, hingga jadi temuan BPK RI. "Delapan OPD kalau tidak salah, sebagai besar. Biasanya besar-besar lah dikasih sampel kan biasanya OPD besar-besar," tuturnya.

Beberapa OPD besar di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang yang

menjadi sampel pemeriksaan BPK RI diantaranya Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian. Adanya temuan kerugian negara dalam perjalanan dinas di jajaran Pemkab Kepahiang diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Zamzami Zubir SE MM. Perjalanan dinas pejabat jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI di Kabupaten Kepahiang.

Sekda mengingatkan OPD terkait agar dapat menuntaskan kekurangan berkas dalam pemeriksaan BPK. Sehingga anggaran yang dikeluarkan dalam berbagai kegiatan ditahun lalu tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. "Ya temuannya ada perjalanan dinas," ujar Sekda. Ada tiga OPD yaitu Bappeda, Nakerstrans dan Sekwan sudah mengansur penyelesaian temuan PBK tersebut sebelum penyerahan berkas Audit dilaksanakan BPK RI Perwakilan Bengkulu. (320)